

RPSEP-66

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN SYARIAH GUNA PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Nuraini, Rifzaldi Nasri
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl KHA Dahlan Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan 15419
Email : bunda_aini27@yahoo.com
rifzaldinasri@yahoo.co.id
jamilah.feumj@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan mengidentifikasi lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang memberikan pembiayaan/pinjaman khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Tangerang Selatan, Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Mengidentifikasi jenis dan kriteria pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Design/metodologi/pendekatan: metode yang dipakai adalah metode survei, dengan melakukan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan terbuka ke nara sumber Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum semua LKMS yang diteliti mempunyai jenis pembiayaan yang sama dengan berbagai masalah baik yang ada pada LKMS maupun UMKM

Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jenis pembiayaan

PENDAHULUAN

Latar Masalah

Ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah serta orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan potensi masalah terbesar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan antara lain melalui program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Asuransi Kesehatan untuk Orang Miskin (Askesin) dan lain-lain. Di sisi lain gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan para penganggur tetap adaterhadap ketidakmampuan pemerintah dalam

menyediakan peluang kerja, walaupun dapat diredam karena tersedianya peluang kerja di sektor informal.

Menurut Andre Bayo Ala (1981) Ada kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu

1. Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah (komunitas).
2. Pengukuran kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh pihak eksternal dan memakai parameter yang terlalu ekonomis. Implikasinya adalah konsep penanganan kemiskinan mengalami bias sasaran dan mereduksi hakikat kemiskinan tersebut.
3. Penanganan program pengentasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang dalam, sehingga banyak gagal akibat belitan prosedur yang panjang.
4. Penanganan kemiskiaan sering ditumpangi oleh kepentingan politik yang amat kental sehingga tidak mempunyai muatan atau makna dalam penguatan perekonomian masyarakat miskin

TELAAH LITERATUR

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh suatu negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam.

Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep. Para ekonom membahas kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan. Sedangkan menurut ketentuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagaimana dikutip oleh Schelzig (2005) bahwa ada lima kategori non-moneter tentang kemiskinan yaitu kekurangan makanan, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal.

Sedangkan Suparlan (1993) berpendapat kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lain halnya dengan Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuatan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keberadaan UMKM dapat ditinjau dari berbagai perspektif, antara lain perspektif kebijakan, perspektif sosial maupun perspektif ekonomi. Dari ketiga perspektif tersebut, perspektif ekonomi merupakan cara pandang pertama yang terbangun dalam literatur kluster. Secara sederhana perspektif ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah cara pandang terhadap fenomena kluster UMKM yang dibangun dari teori ekonomi

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain: Menurut Bolton (1971), UMKM Secara kualitatif, dapat didefinisikan sebagai usaha mandiri, dikelola oleh pemiliknya atau bagian - pemilik dan memiliki porsi kecil dari pasar. Usaha kecil diperlakukan sebagai perusahaan kecil dan menengah (UKM) dan diambil untuk menjadi sebuah organisasi yang mempekerjakan kurang dari 250 karyawan, seperti yang diadopsi oleh Uni Eropa (CEC, 1996), Departemen Perdagangan dan Industri, Inggris (DTI, 1999) dan Dinas Usaha Kecil, UK (SBS, 2000). Definisi lain telah digunakan di Amerika Serikat (SBA, 2003) dan di Jepang (SMEA - METI, 2003). Misalnya, AS menganggap perusahaan kecil untuk memasukkan mereka yang kurang dari 500 karyawan.

C. Permasalahan UMKM

UMKM menghadapi dua permasalahan utama yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen).

Masalah finansial

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM;
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM;
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil;

4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi;
6. Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Masalah non finansial

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan;
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar;
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM;
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Penelitian Terdahulu

Sukron, dalam penelitiannya yang berjudul strategi lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah menyimpulkan bahwa (1) strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) antara lain : (a) datang langsung ke tempat calon nasabah, strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi BMT Al-Munawwarah kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. (b) rekomendasi mitra lama, yaitu dengan cara melihat data-data mitra yang memang sudah dikenal lebih dahulu atau melalui mitra yang lain dan saling memberi informasi jika ada mitra yang lain membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. (c) Jenis usaha yang dibiayai, strategi ini digunakan untuk menyaring jenis usaha apa saja yang boleh dibiayai oleh BMT Al-Munawwarah tentunya berdasarkan syariat Islam. (d) Promosi, dalam melakukan promosi BMT menggunakan brosur, surat kabar, internet, stasiun radio, banner dan lain-lain. (2)

Perkembangan pembiayaan BMT Al-Munawwarah terhadap UKM dengan strategi-strategi yang telah dilakukan dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM terbukti berhasil karena rata-rata tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Muhammad Hafidz Lidinillah, dalam penelitiannya yang berjudul persepsi pengusaha kecil terhadap pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil menyimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil memiliki persepsi yang positif terhadap produk BMT yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. BMT melalui produk pembiayaannya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan UMKM dengan didukung pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala oleh pihak BMT.

Febrinol, Tisna Surya Adi Prenanto dan Riyadian Dwi Cahyo dalam penelitiannya yang di publikasikan di situs harian Kompas Pada tanggal 25 September 2012, dengan judul “*Peran Perbankan Syariah dalam Usaha Kecil dan Menengah*” mengatakan bahwa “Ketika kita menelaah lebih jauh dari kondisi perkembangan perekonomian masyarakat kita, bahwasanya ekonomi rakyatlah yang akan menjadi benih awal yang akan mewujudkan perekonomian nasional yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat kita sendiri dalam usaha pengembangan kearifan lokal. Ujud kongkrit dari berkembangnya ekonomi rakyat yang diwujudkan dalam bentuk Usaha Kecil Menengah ini kalau kita mencoba menelaah lebih jauh, ternyata yang berperan dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah peranan bank syariah yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat itu sendiri.

Selama ini langkah dari bank syariah telah memberikan semangat dan dorongan terhadap terwujud dan terbangunnya semangat para masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan menengah kebawah yang ingin mencoba ikut serta dalam upaya mewujudkan perekonomian bangsa yang berorientasi kedepan dan bermasa depan yang jelas yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil pada umumnya. Itu semua telah diwujudkan dengan upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang benar- benar mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

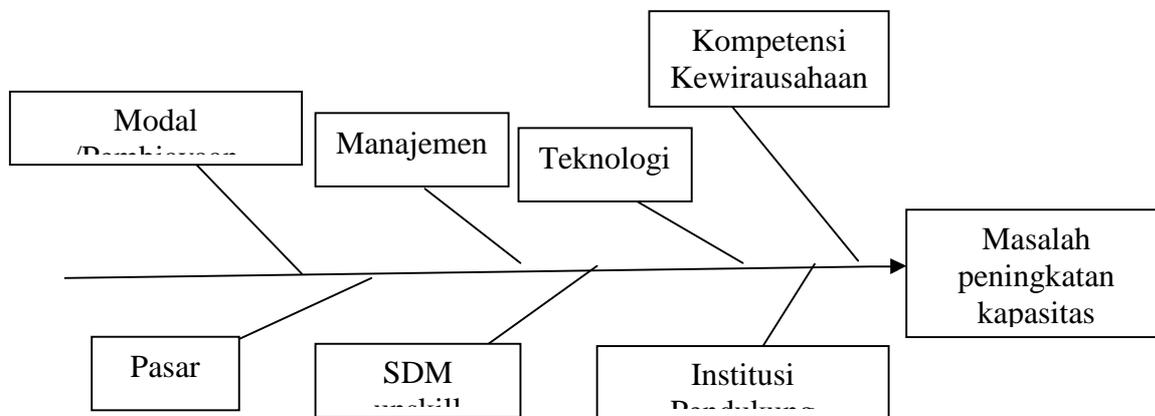
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan

berbagai data, dokumen dan informasi yang aktual. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk analisis sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Menurut Sugiyono (2012:9) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat *interaktif (reciprocal)*.

Sesuai dengan masalah penelitian yang akan di analisis, maka metode yang dipakai adalah metode naturalistik dan deskriptif, karena dengan metode ini dapat membedah, membahas, dan mengenali masalah-masalah



HASIL PENELITIAN

Di Tangerang Selatan ada sekitar 30 BMT yang membantu permodalan UMKM dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Sebagai contoh BMT Al Munawarrah yang memberikan pembiayaan hingga Rp 20.000.000.000 kepada UMKM pada tahun 2013, jumlah ini hampir 90% dari seluruh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Al Munawarrah, 2013).

Kiat-kiat lembaga keuangan mikro syariah (BMT) dalam memberikan pembiayaan/pinjaman khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari Dinas KUKM dan Dinas Industri & Perdagangan Tangerang Selatan juga cukup baik melalui pelatihan-pelatihan, pameran & bazaar, bantuan peralatan, program pendaftaran merek, sertifikasi Halal, uji dinas kesehatan (Nomer PIRT) bagi pelaku UMKM secara gratis. Semua kegiatan tersebut membantu UMKM dan BMT terkait

dengan pemberkasan legal formal.

- b. BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya, hal yang tidak pernah dilakukan oleh pihak perbankan baik konvensional maupun syariah.
- c. BMT mampu melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan karena pengelola BMT cukup terlatih untuk melakukan penilaian kelayakan usaha dengan metode yang berbeda.
- d. BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada UMKM untuk mendorong kemajuan usaha mereka, hal ini merupakan wujud tanggungjawab BMT untuk berperan dalam mensejahterakan masyarakat
- e. BMT bersedia melayani transaksi pembiayaan dibawah Rp 1.000.000, yang tidak pernah bisa dilayani oleh pihak perbankan maupun BPR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang beragam. Dari beragam permasalahan yang dihadapi UMKM, dapat dibagi menjadi masalah internal dan masalah eksternal

Masalah Internal

- a. Kebanyakan bentuk usaha biasanya masih perorangan dan belum berbadan hukum, aspek legalitas usaha lemah, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang kurang jelas;
- b. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-*aspek entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar;
- d. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat;
- e. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas;
- f. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi;
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena

keterbatasan sistem administrasi;

- h. Sebagian besar Pelaku UMKM belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan modal usaha;
- i. Sebagian besar belum mampu membuat perencanaan usaha yang akan dilakukannya sehingga sulit untuk berkembang.

Sedangkan permasalahan eksternalnya adalah :

- a. Kesulitan dalam pemasaran karena sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor;
- b. Keterbatasan dalam finansial UMKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu : mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi;
- c. Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi;
- d. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi;
- e. Kebijakan pemangku kepentingan yang kontraproduktif terhadap pengembangan UMKM, antara lain peraturan perbankan yang menyulitkan pinjaman permodalan, keamanan dan kenyamanan berusaha, infrastruktur daerah, proses perijinan dan sertifikasi yang rumit, dan yang terbaru adalah kewajiban setor pajak 1% bagi UMKM.

Dari beberapa BMT yang menjadi objek penelitian ini, umumnya mempunyai jenis pembiayaan yang sama antara lain :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan bagi UMKM yang mempunyai usaha yang layak, tetapi mengalami kesulitan dana, dapat mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah. BMT akan memberikan pinjaman modal usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan untuk UMKM yang mempunyai usaha yang layak, tetapi mengalami kesulitan dana dan pengelolaan usaha, dapat mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. UMKM dan BMT akan bersama-sama membiayai dan mengelola usaha UMKM dengan sistem bagi hasil sesuai penyertaan modal masing-masing pihak.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan suatu barang atau alat kerja, tetapi mengalami kesulitan dalam pengadaan dana tunai. UMKM dapat mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah. BMT akan memberikan dana pinjaman yang akan dikembalikan sekaligus pada saat jatuh tempo dengan mark up (pertambahan nilai).

Gambar 4.1 Skema Peningkatan Kapasitas UMKM



IDENTIFIKASI MASALAH GUNA PENINGKATAN KAPASITAS UMKM

1. Usaha BMT untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM
 - a. Bersedia membiayai usaha yang baru dan sedang tumbuh di lingkungannya.
 - b. Melakukan pembiayaan terhadap usaha yang belum mapan.
 - c. Melakukan pendekatan dan bantuan kepada UMKM untuk mendorong kemajuan usaha mereka
 - d. Melayani transaksi pembiayaan dibawah Rp 1.000.000, yang tidak pernah bisa dilayani oleh pihak perbankan maupun BPR.
2. Permasalahan UMKM
 - a. Internal : Struktur organisasi lemah, legalitas tidak ada, pembukuan sederhana, SDM terbatas, margin usaha kecil, sumber dana terbatas, tidak ada perencanaan usaha,
 - b. Eksternal : Kesulitan pemasaran, Keterbatasan Financial, Keterbatasan Bahan baku, keterbatasan, Teknologi, Kebijakan pemangku kepentingan khususnya perbankan
3. Jenis Pembiayaan yang diminati UMKM
 4. Pembiayaan Mudharabah
 5. Pembiayaan Musyarakah
 6. Pembiayaan Murabahah

DAFTAR PUSTAKA

Andre Bayo Ala.(1981), “Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan”, Liberty, Yogyakarta.

Andang Setyobudi.(2007), “Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Agustus Volume 5, No. 2.

Adenan Djamasri, dkk. (2001), “Ekonomi Pembangunan I”, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Adiwarman Karim.(2004), “Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo, Jakarta.

Dahlan Siamat.(1995), “Manajemen Lembaga Keuangan”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Davis Horward and Associates. (1996), “Enabling or Disabling Local Government: Choices for the future Buckingham Philadelphia: Open University Press.

Genjot Sektor UKM dengan Kredit Usaha Rakyat, (2007), Jurnal UKM, edisi November.

Hertanto Widodo, Ak, et al.(1999), “Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, Mizan, Bandung.

Ismail. (2011), “Perbankan Syariah”, Prenada Group, Jakarta.

Kuncoro Mudrajat.(2000), “Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Kasmir. (2005), “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Syafi’i Antonio.(2001), “Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”, Gema Insani, Jakarta.

Mervyn K Lewis, Ltifa M Al-Gaod.(2007), “Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek”, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Muhammad.(2002), “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
_____ (2006), “Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah”, UII Press, Yogyakarta.

Meier, Gerald M. (1995). “Leading Issues in Economic Development”, University Press, Oxford.

Muhammad Ridwan. (2005), “Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”, UII Press, Yogyakarta.

- _____ (2006), “Sistem dan Prosedur Pendirian BMT”, Citra Media, Yogyakarta.
- Suparlan Parsuadi. (1993), “Kemiskinan Di Perkotaan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Schelzig, K. (2005), “Poverty in the Philippines: Income, assets, and access”, Manila: Asian Development Bank. Retrieved from <http://www.adb.org/documents/books/Poverty-in-the-Philippines/Poverty-in-the-Philippines.pdf>.
- Soerjani, Moh. dkk. (1987), “Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan”, UI-Press, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. (2003), “Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan”, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Todaro, M. P. & S.C. Smith. (2006), “Economic development 8th edition. Manila, Philippines: Pearson South Asia Pte. Ltd.
- _____ (2000), “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M.A. Jakarta: Erlangga. Future Buckingham Philadelphia: Open University Press.
- Mar Chapra. (2001), “Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam”, Gema Insani Press, Jakarta.
- Veithzal Rivaidan Arviyan Arifin. (2010), “Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi”, Bumi Aksara, Jakarta. www.depkop.go.id, 15 Januari 2013
- Rizkywahyudin.wordpress.com/2011/01/03/permodalan-ukm/ , 15 Januari 2013
- Azrafikriansyah.blogspot.com/ , 15 Januari 2013
- Lensa Indonesia.com
- Berita Resmi Statistik N 2 o. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013
- Sumber: <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2157676-pengertian-pembiayaan/#ixzz2QF5tEbHW>
- Sumber: <http://www.apkasi.or.id/>